

Inkonsistensi implementasi kebijakan kriminal hak cipta dalam kasus vcd bajakan

Arminsyah, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=90527&lokasi=lokal>

Abstrak

Perlindungan hak cipta di Indonesia sudah ada sejak tahun 1911 dengan diberlakukannya Oclrooi Wel no. 136. Setelah Indonesia merdeka, kriminalisasi pelanggaran hak cipta dirumuskan dengan UU no. 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta yang kemudian diubah dengan UU no. 7 tahun 1987 dan UU no. 12 tahun 1997. Tetapi, dalam implementasi, tidak dapat berjalan sesuai yang dirumuskan. Di antaranya adalah, ketidakmampuan polisi dan PPNS menghadapi maraknya peredaran vcd bajakan film-musik di seluruh Indonesia dan khususnya di Glodok sebagai pasar besar dan sumber peredaran vcd bajakan.

Alas dasar alasan tersebut dilakukan penelitian mengenai inkonsistensi implementasi kebijakan hak cipta khususnya vcd bajakan. Tesis ini selanjutnya menjawab pertanyaan tentang bagaimana bentuk dan pola inkonsistensi implementasi kebijakan kriminal hak cipta khususnya vcd bajakan dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan kriminal hak cipta terhadap terjadinya inkonsistensi, dengan pengumpulan data dan informasi perpustakaan, wawancara dan observasi/pengamatan.

Kriminalisasi pelanggaran hak cipta sebagaimana dirumuskan dalam UU HC telah memenuhi tujuh kriteria kriminalisasi perbuatan yang syaratkan George F Cole yaitu memenuhi unsur legality, actus reus, causation, harm, concurrence, mens rea dan punishment. Dalam implementasi UU HC masih terdapat hal yang tidak dibuat oleh pemerintah, diantaranya Peraturan Pemerintah mengenai tata cara pendaftaran lisensi, sehingga menyulitkan untuk mengelahi siapa pemegang hak atas suatu ciptaan lebih-lebih untuk film dari luar negeri.

Ketidakmampuan polisi dan PPNS dalam menindak peredaran vcd bajakan khususnya di Glodok, sesuai dengan teori Turk. (1) Karena resisten terorganisir dan canggih, (2) Kekuatan massa pedagang vcd bajakan, (3) Kejahatan vcd bajakan pada kenyataannya tidak dirasakan sebagai kejahatan disebabkan korbannya orang kaya atau perusahaan besar. Bahwa kasus vcd bajakan ternyata,

- (a) Sebagian besar berdampingan dengan kasus vcd porno yang dikeleahi mudah pembuktiannya dan lebih mendapat dukungan masyarakat dalam penindakannya,
- (b) Kasus vcd bajakan kurang dirasakan efek negatiffiya sebagai kejahatan,
- (c) Terdapat prosedur pembuktian yang sulit dan birokrasi yang rumit menurut kalangan polisi dan jaksa.